

***COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL PENTAHelix
DALAM MEMBANGUN KELEMBAGAAN TATA KELOLA
PERNIAGAAN KOPI AGROFORESTRY DI PROVINSI JAWA BARAT***

Disusun Oleh :

NAMA	:	YUSSI NADIA
NPM	:	2061001008
JURUSAN	:	ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	:	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2021**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

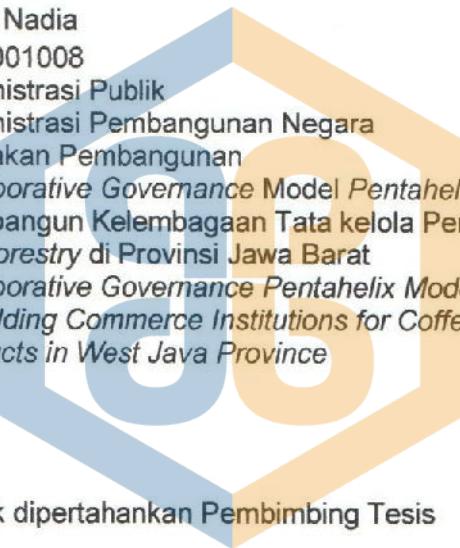
Nama : Yussi Nadia
NPM : 2061001008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis : *Collaborative Governance Model Pentahelix dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*
Thesis Title : *Collaborative Governance Pentahelix Model in Building Commerce Institutions for Coffee Agroforestry Products in West Java Province*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Pembimbing I
(Dr. Asropi M.Si.)

Pembimbing II
(Dr. Edy Sutrisno, M.Si.)



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : YUSSI NADIA
NPM : 2061001008
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JUDUL TESIS : COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL
PENTAHelix DALAM MEMBANGUN
KELEMBAGAAN TATA KELOLA PERNIAGAAN
KOPI AGROFORESTRY
DI PROVINSI JAWA BARAT

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si.
Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA.
Anggota : Dr. R. Luki Karunia, MA.
Pembimbing 1 : Dr. Asropi, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yussi Nadia
NPM : 2061001008
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari hasil penelitian tesis ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 24 Desember 2021

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**



Yussi Nadia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Waa Taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "*Collaborative Governance Model Pentahelix dalam Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat*".

Ketertarikan saya terhadap permasalahan petani kopi *agroforestry* khususnya dalam tata niaga komoditasnya dikarenakan fakta yang saya temui dilapangan menunjukkan perbedaan yang tajam antara tingkat kesejahteraan petani kopi *agroforestry* dengan komoditasnya yang berKPSalitas tinggi sekelas premium, bahkan dibeberapa lokasi juga telah menembus pasar ekspor.

Tingkat kesejahteraan petani kopi *agroforestry* yang masih rendah, serta minimnya pemenuhan akan kebutuhan primer serta standar kesehatan dan pendidikan yang layak, dianggap sangat kontradiktif dengan komoditasnya. Peran Pemerintah dan para pihak khususnya di Provinsi Jawa Barat masih berpeluang untuk dioptimalkan. Peran yang bersifat kolaboratif dan adaptif dengan perubahan jaman juga sudah selayaknya mulai dikedepankan. Sehingga dapat menjadi "*problem solving*" dalam perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Asropi, M.Si dan Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, atas kebaikan yang beliau berdua miliki dalam membimbing dan mengarahkan serta memahami keterbatasan pengetahuan yang saya miliki dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terimakasih saya sampaikan juga kepada Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si., Bapak Dr. Ir. R. Luki Karunia, MA. dan Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP, MPA., selaku dosen pembahas dan penguji dalam penyusunan tesis ini, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dalam memperkaya penulisan tesis ini.

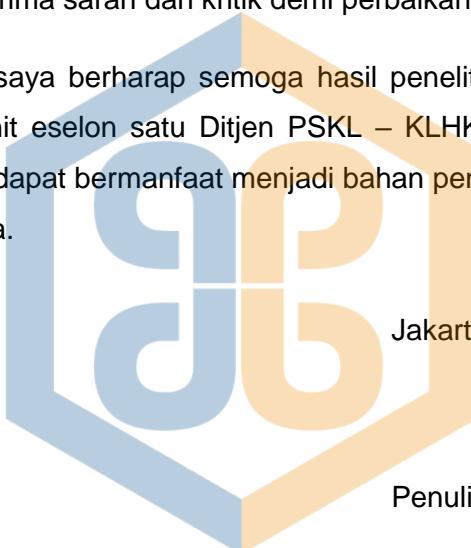
Penyusunan tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta, Dr. Mala Sondang Silitonga, S.Sos, MA.
3. Seluruh Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya selama proses peRKPSliahana kepada penulis.
4. Suami saya Bapak Tri Winarno, anak kami Dinar Arsy Azzahra Imani dan Muhammad Haidar Alhaq Ilmani yang selama ini telah memberikan dukungan dan doa terbaik untuk saya.
5. Bapak Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan arahan kebijakan dalam Program Perhutanan Sosial serta saran masukan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Ir. Erna Rosdiana, M.Si, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan dukungan moril bagi saya serta informasi menyeluruh terkait perencanaan percepatan pengelolaan perhutanan sosial dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Ir. Sugeng Harmono, M.Si, Asisten Deputi Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang telah berkenan memberikan informasi terkait penyusunan peta jalan Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
8. Para narasumber penelitian saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, dengan data dan informasi lengkap dari Bapak/Ibu maka penyusunan tesis ini menjadi kaya informasi, telaahan dan analisis dikelima elemen *pentahelix* yang saya teliti.
9. Seluruh pegawai Bagian AAK yang telah membantu kelancaran studi saya selama di Politeknik STIA LAN Jakarta.

10. Seluruh teman magister terapan angkatan tahun 2019 yang sangat mensupport saya dalam penyusunan tesis ini.

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu tetapi terkait selama penyusunan tesis ini. Terlepas dari itu semua, saya menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam tesis ini, maka dengan terbuka saya menerima saran dan kritik demi perbaikan kedepan.

Akhir kata saya berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi unit eselon satu Ditjen PSKL – KLHK dimana saya mengabdi dan secara umum dapat bermanfaat menjadi bahan pembelajaran serta referensi bagi peneliti lainnya.



Jakarta, Desember 2021

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

ABSTRAKSI
COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL PENTAHelix
DALAM MEMBANGUN KELEMBAGAAN TATA KELOLA PERNIAGAAN
KOPI AGROFORESTRY DI PROVINSI JAWA BARAT
yussinadia@stialan.ac.id
POLITEKNIK STIA LAN Jakarta

Program Perhutanan Sosial yang merupakan "corrective action" dari kebijakan pengelolaan kawasan hutan di masa lalu, sudah saatnya memasuki era pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan tiga pilar kelolanya, yaitu: kelola kelembagaan kelompok tani hutan, kelola kawasan hutan dan kelola usaha komoditasnya, sehingga tujuan program dapat tercapai, yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Salah satu komoditas unggulan perhutanan sosial yang belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani hutan adalah kopi *agroforestry*, padahal dari segi kualitas, kopi *agroforestry* merupakan kelas premium yang beRKPSalitas ekspor. Identifikasi permasalahan bermuara pada belum adanya tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* yang terlembaga dan berfungsi mengatur perniagaan secara berkeadilan khususnya bagi produsen/petani kopi. Proteksi Pemerintah dalam bentuk regulasi sangat dibutuhkan agar sistem *agroforestry* yang merupakan sistem tata kelola hutan berkelanjutan dapat berdampak positif juga terhadap peningkatan kesejahteraan petani hutan.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan petani kopi serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendukung kolaborasi sehingga tersusun model kolaborasi yang lebih efektif.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama, yaitu: permasalahan hulu produksi petani kopi yaitu: mulai tahap budidaya tanaman, minimnya lahan garapan, minimnya akses permodalan, pemenuhan kualitas bibit tanaman dan belum adanya pendampingan yang memadai. Sedangkan permasalahan hilir produksi, yang merupakan permasalahan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* paska panen meliputi: komoditas kopi yang bersifat *volumunius and bulky*, yaitu komoditas yang mudah rusak dan busuk sehingga membutuhkan tempat yang besar dan luas serta biaya penyimpanan yang cukup besar.

Faktor penghambat kolaborasi berupa: tugas, fungsi dan kewenangan yang selama ini masih tersekat – sekat dan berorientasi sektoral, menyebabkan belum efektifnya sinergitas terkait program dan kegiatan yang ada antar para *stakeholder* menjadi isu utama. Sedangkan faktor pendukung dalam perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* yang telah ada, yaitu: dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat berupa SK. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) dan SK. Gubernur Jawa Barat Nomor: 522/Kep.140-Rek/2020 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) dapat dijadikan hal strategis dalam kolaborasi.

Model kolaborasi *pentahelix* hasil penelitian ini dapat diimplementasikan pada level Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SK. Bupati tentang Kelompok

kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS). Konsensus bersama kolaborasi di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut berupa pembentukan lembaga/badan pengelola sebagai upaya perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*. Rekomendasi lembaga/badan pengelola merupakan kelembagaan ekonomi yang secara proaktif dapat mengeksplorasi kekuatan ekonomi sosial dari *civil society* (petani kopi, pelaku usaha kopi *agroforestry* serta *stakeholder* terkait lainnya), yang mampu menggerakkan perekonomian di daerah dengan potensi dan kekuatan ekonomi sosial asli daerah tersebut. Bentuk kelembagaan ekonomi berbasis potensi ekonomi sosial masyarakat tersebut dapat berupa korporasi swasta (Perseroan Terbatas) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara professional dan *profit oriented*.

Dalam membangun kelembagaan ekonomi perniagaan kopi *agroforestry* tersebut, dibutuhkan perangkat organisasi kelembagaan baru, yang mampu mengakomodir perubahan zaman seperti era digitalisasi saat ini. Keberlangsungan kelembagaan ekonomi saat ini sangat bergantung dari faktor eksternal, berupa pangsa pasar yang berkembang dan semakin luas, maka dibutuhkan inovasi faktor internal berupa: diversifikasi produk yang beragam, perubahan bisnis proses, industrialisasi hulu sampai hilir, serta pengembangan faktor – faktor produksi berupa: peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola, tercukupinya akses permodalan, infrastruktur sarana/prasarana produksi yang memadai, sangat dibutuhkan guna menaikkan rantai nilai produk komoditas kopi *agroforestry*, sehingga memiliki daya saing dalam perdagangan nasional maupun internasional.

Kata kunci: perhutanan sosial, *collaborative governance*, *stakeholder pentahelix*, kopi *agroforestry*.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

ABSTRACTION
COLLABORATIVE GOVERNANCE PENTAHelix MODEL
IN BUILDING COMMERCIAL GOVERNANCE INSTITUTIONS
COFFEE AGROFORESTRY IN WEST JAVA PROVINCE
yussinadia@stialan.ac.id
POLITEKNIK STIA LAN Jakarta

The Social Forestry Program which is a "corrective action" from past forest area management policies, it is time to enter the era of involving all stakeholders in the development of the three pillars of its management, namely: institutional management of farmer groups, forest area management and business management, so that the program objectives can be achieved. achieved, namely sustainable forests and prosperous communities.

One of the leading social forestry commodities that has not had a significant impact on improving the welfare of forest farmers is agroforestry coffee, whereas in terms of quality, agroforestry is a premium class with export quality. Identification of the problem leads to the absence of an institutionalized agroforestry coffee trade management and throughout the world of commerce in a fair manner, especially for coffee producers/farmers. Government protection in the form of regulation that is very much needed so that the agroforestry system which is a sustainable forest management system can have a positive impact on improving the welfare of forest farmers.

This study aims to identify and analyze coffee problems as well as identify and analyze the inhibiting and supporting factors for collaboration so as to create a more effective collaboration model.

The results of this study identified two main problems, namely: problems in the upstream production of coffee farmers, namely: starting from the stage of plant cultivation, lack of arable land, lack of access to capital, fulfillment of plant seed quality and the absence of adequate assistance. Meanwhile, downstream problems, which are post-harvest agroforestry coffee trade governance problems, include: coffee commodities that are large in volume, i.e., that are easily damaged and rotten, so that they require a large and spacious place and large storage costs.

The collaboration factor is in the form of: tasks, functions and authorities which are still divided and sectoral, causing the ineffectiveness of synergy related to existing programs and activities between stakeholders to be the main issue. While the supporting factors in improving the governance of the existing agroforestry coffee trade, namely: policy support from the Central Government in the form of a decree. Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Number 126 of 2021 concerning the National Working Group (Pokjanas) for the Acceleration of Social Forestry Management (PPPS) and SK. The Governor of West Java Number: 522/Kep.140-Rek/2020 concerning the Working Group (Pokja) for the Acceleration of Social Forestry (PPS) can be used as a strategic matter in collaboration.

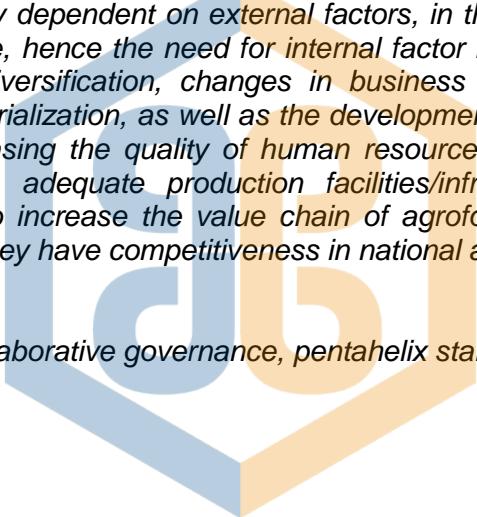
The pentahelix collaboration model as a result of this research can be implemented at the district level through a decree. Regent on the Working Group (Pokja) for the Acceleration of Social Forestry Management (PPPS). The consensus with collaboration at the Regency level is in the form of the establishment of management institutions/agencies as an effort to improve the

governance of the coffee agroforestry trade. Recommendations for management institutions/agencies are economic institutions that can proactively explore the social economic strength of civil society (coffee farmers, coffee agroforestry business actors and other relevant stakeholders), which are able to drive the economy in the region with the potential and social economic strength of the original region. The form of economic institutions based on the socio-economic potential of the community can be in the form of private corporations (Limited Companies) or Regional Owned Enterprises (BUMD) which are managed in a professional and profit-oriented manner.

In building the economic institutions of the agroforestry coffee trade, a new institutional organization is needed, which is able to accommodate changing times such as the current digitalization era. The sustainability of current economic institutions is highly dependent on external factors, in the form of a growing and wider market share, hence the need for internal factor innovation in the form of: diverse product diversification, changes in business processes, upstream to downstream industrialization, as well as the development of production factors in the form of: increasing the quality of human resource management, adequate access to capital, adequate production facilities/infrastructure, are urgently needed in order to increase the value chain of agroforestry coffee commodity products, so that they have competitiveness in national and international trade.

Keywords:

Social forestry, collaborative governance, pentahelix stakeholder, agroforestry coffee



POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	-
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR FOTO	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I. Permasalahan Penelitian	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Permasalahan	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II. Tinjauan Pustaka	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	20
1. Tinjauan Kebijakan	20
2. Tinjauan Teoritis	27
a. Kebijakan Publik	27
b. <i>Collaborative Governance</i>	30

c. Kelembagaan	43
d. Tata Niaga	46
C. Kerangka Berpikir.....	51
BAB III. Metodologi Penelitian	56
A. Metode Penelitian	56
B. Teknik Pengumpulan Data	56
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	61
D. Validasi Penelitian	63
E. Instrumen Penelitian	64
BAB IV. Hasil Penelitian	67
A. Lokasi Penelitian	67
B. Penyajian dan Analisis Data	69
BAB V. Simpulan dan Saran	151
A. Simpulan	151
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA.....	157

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Desa yang Mendapat Program Perhutanan Sosial Menurut Provinsi dan lokasi Kawasan Hutan	4
Tabel 1.2	Produksi Kopi Tanaman Rakyat Tahun 2017 – 2021	6
Tabel 1.3	Produksi Tanaman Kopi Provinsi Jawa Barat	12
Tabel 2.1	Tugas, Fungsi dan Peran <i>Stakeholder</i> dalam <i>Collaborative Governance Model Pentahelix</i> dalam Penelitian	38
Tabel 3.1	Daftar <i>Key Informant</i> dalam Penelitian	58
Tabel 3.2	Teknik Pengumpulan Data Penelitian	64
Tabel 4.1	Analisis Kepentingan dan Pengaruh Para Pihak dalam Kolaborasi	133
Tabel 4.2	Pemetaan Peran Para Pihak dalam Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat	135
Tabel 4.3	Analisis Peran Implementatif Para Pihak dalam Membangun Kelembagaan Tata kelola Perniagaan Kopi Agroforestry	140
Tabel 4.4	Kepentingan dan Pengaruh Para Pihak dalam Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi Agroforestry	142
Tabel 4.5	Klasifikasi <i>Stakeholder</i> dalam Mendorong Kebijakan Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi dan Kualifikasi KUPS	9
Gambar 1.2	Data Sepuluh Komoditas HHBK Produk Perhutanan Sosial .	9
Gambar 1.3	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	13
Gambar 2.1	Proses Interaksi dalam Model Kolaborasi	54
Gambar 4.1	Model Kolaborasi	144
Gambar 4.2	Pola Interaksi dalam Kolaborasi	148



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR FOTO

Foto-1	Tinjauan Lapangan LMDH Bukit Amanah, Kabupaten Bandung	72
Foto-2	Tinjauan Lapangan LMDH Puncak Lestari Kabupaten Bogor	72
Foto-3	Wawancara dengan Ketua LMDH Puncak Lestari dan KUPS Kopi Cibulao, Kabupaten Bogor	72
Foto-4	Tinjauan Lapangan dan Wawancara Bersama Pengurus LMDH Mandalagiri, Kabupaten Garut	73
Foto-5	Wawancara Bersama Pelaku Usaha Kopi Agroforestry, Bapak Tejo Pramono	114
Foto-6	Wawancara bersama Akademisi, Prof. Didik Suhardjito, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB	118
Foto-7	Wawancara bersama Bapak Heri Susanto, Direktur Riset dan Development katadata.co.id	126
Foto-8	Validasi Hasil Penelitian Melalui <i>FGD</i> bersama Elemen <i>Pentahelix</i> Guna Justifikasi Model Kolaborasi	132



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Lampiran 2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522/Kep-410-Rek/2020 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Pedoman Observasi
- Lampiran 5. Data Sekunder Penelitian



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR SINGKATAN

KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Menko Marves	: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDH	: Sumber Daya Hutan
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LMDH	: Lembaga Masyarakat Desa Hutan
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
HHK	: Hasil Hutan Kayu
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
MPTS	: Multiple Purpose Trees System
Pokjanas PPPS	: Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pokja PPS	: Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
IPHPS	: Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
KPH	: Kesatuan pengelola Hutan
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
TP2PS	: Tim penggerak Percepatan Perhutanan Sosial
DKN	: Dewan Kehutanan Nasional
DPD HKTI	: Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
BPD PHRI	: Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
ICRAF	: <i>International Centre for Research in Agroforestry</i>
IAD - SF	: <i>Integrated Area Development – Social Forestry</i>
RKPS	: Rencana Kelola Perhutanan Sosial
RKT	: Rencana Kelola Tahunan

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, koordinatif dan partisipatif merupakan indikator keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut dengan "*Good Governance*". Melalui pelayanan publik yang peduli, inklusif, dan kolaboratif diharapkan dapat memperbaiki standar sistem pelayanan publik yang ada, sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat (Dwiyanto, 2015, h.38).

Pelayanan publik di Indonesia saat ini memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut membutuhkan perubahan yang cukup mendasar dan adanya pengembangan paradigma baru yang sesuai dengan eranya. Perubahan dunia yang semakin cepat diberbagai aspek kehidupan juga menuntut adanya percepatan dalam sistem pelayanan publik. Sistem pelayanan publik di Indonesia sudah semestinya berlandaskan pada mewujudkan tujuan negara yaitu menuju "*welfare state*". Sesuai yang diamanahkan pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di beberapa Negara Kesejahteraan, saat ini kesejahteraan rakyat tidak hanya disediakan oleh Negara melalui kinerja Pemerintah, tetapi juga melibatkan elemen non Pemerintah lainnya seperti sektor swasta, *civil society*, perguruan tinggi dan lain sebagainya (Yustika dan Baksh, 2021, h.168).

Saat ini dengan semakin tingginya angka kemiskinan, karena adanya *pandemic covid 19*, semakin meningkatkan indeks Gini, yaitu indeks yang menggambarkan tingginya ketimpangan pendapatan dan kerentanan sosial di masyarakat. Indeks Gini Indonesia pada Maret 2021 tercatat naik menjadi 0,384 dibanding Maret 2020 indeks Gini Indonesia 0,381 (BPS, 2021).

Perubahan tatanan dunia yang terjadi saat ini, sejak adanya *pandemic covid 19* semakin meningkatkan angka kemiskinan tersebut membutuhkan

kebijakan pembangunan yang mampu bertransformasi terhadap perubahan yang fundamental. Salah satu amanat pembangunan ekonomi nasional adalah pengentasan kemiskinan maka pemerintah bertanggungjawab dalam penyelengaraan pemerintah yang baik dalam menangani persoalan publik, maka dibutuhkan tata kelola pemerintah yang baik yang adaptif dan mampu menjawab persoalan – persoalan publik ke depan. Perubahan tata kelola pemerintahan harus berorientasi pada tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, baik di bidang politik, sosial, ekonomi tak terkecuali administrasi negara dalam menjawab tantangan era yang baru.

Tujuan menghapus kemiskinan, juga diamanatkan dalam *Sustainable Development Goal's (SDG's)* pertama, yaitu dengan target memastikan seluruh penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara dalam mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak atas pelayanan dasar), kepemilikan dan akses lahan. Serta tujuan ke sepuluh dari *SDG's*, yaitu mengurangi ketimpangan sosial, dengan target pada tahun 2030 secara bertahap mencapai pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi termiskin meningkat lebih tinggi dari rata – rata nasional. Guna mencapai target - target tersebut, yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui sistem pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap isu – isu pembangunan khususnya pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meminimalisasi kesenjangan sosial, dimana 78% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan rentan dengan kemiskinan (Iskandar, 2020, h.38), pemerintah sejak tahun 2016 telah mencanangkan Program Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial diperuntukkan bagi penduduk miskin di pedesaan yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan langsung dengan sumber daya hutan (SDH) dalam pemenuhan mata pencahariannya. Target 12,7 juta Ha, yang merupakan ±10% dari luas kawasan hutan di Indonesia didistribusikan kepada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dengan kriteria subyek penerima hak pengelolaan kawasan hutan sebagai berikut: (1) Masyarakat setempat dibuktikan dengan kartu identitas (KTP) atau surat keterangan domisili, (2) Merupakan masyarakat setempat yang tidak memiliki lahan garapan/sebagai buruh tani, (3)

Adanya konflik sumber daya hutan (SDH) dan konflik tenurial di kawasan hutan, perhutanan sosial dimaksudkan untuk penyelesaian konflik dimaksud dan (4) Bukan Pegawai negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini selaras dengan visi dan misi Pemerintah yang tertuang dalam nawacita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan mempeRKPSSat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan nawacita ketujuh: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.

Program Perhutanan Sosial merupakan pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar kawasan hutan yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Indonesia saat ini. Realitanya, tingkat kepemilikan lahan yang sempit di Pulau Jawa ±0,5 hektare per kepala keluarga, tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani hutan, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam pemberian akses legal tersebut, dengan menempatkan penduduk disekitar kawasan hutan yang matapencarharianya bergantung dengan SDH sebagai subyek dalam pengelolaan kawasan hutan.

Mandat Program Perhutanan Sosial dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tetapi program yang berpihak pada rakyat ini belum dapat mencapai tujuan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan bahkan menjadi sentra - sentra produksi berbasis komoditas perhutanan sosial. Dalam mewujudkan kesejahteraan petani perhutanan sosial, maka penting adanya pendampingan dalam kelola kelembagaan kelompok tani hutan (KTH), kelola kawasan hutan dalam pemanfaatan hasil hutan dan kelola usahanya. Ketiga kelola tersebut bertujuan memandirikan KTH dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologis sesuai yang tercantum dalam pasal 108 ayat (4), Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pendampingan pengelolaan perhutanan sosial dalam tiga aspek tersebut diharapkan dapat berjalan optimal apabila ada pelibatan *multi stakeholder*, dari mulai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung – jawab dalam pemberdayaan masyarakat, sektor swasta sebagai *offtaker*

produk/komoditas, *civil society*/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ORMAS) sebagai pendamping petani ditingkat tapak, akademisi/perguruan tinggi melalui penelitian yang bersifat inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil hutan, serta media massa yang berfungsi menjadi sarana informasi dan memiliki fungsi advokasi dalam mendorong kebijakan pemerintah yang bersifat kolaboratif.

Selama lima tahun pelaksanaan Program Perhutanan Sosial telah tersebar ke 33 Provinsi se-Indonesia. Berikut data jumlah capaian target desa yang mendapat Program Perhutanan Sosial berdasarkan Provinsi.

TABEL 1.1
Jumlah Desa yang Mendapat Program Perhutanan Sosial Menurut Provinsi
dan lokasi Kawasan Hutan

No	Provinsi	Lokasi Kawasan Hutan			Jumlah
		di Dalam	di Tepi	di Luar	
1	Aceh	-	30	3	33
2	Sumut	2	66	2	70
3	Sumbar	-	117	2	119
4	Riau	-	42	3	45
5	Jambi	-	61	8	69
6	Sumsel	-	64	7	71
7	Bengkulu	-	31	11	42
8	Lampung	1	81	12	94
9	Kep. Babel	-	62	1	63
10	Kepri	-	14	-	14
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	71	-	71
13	Jawa Tengah	-	47	2	49
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	48	1	49
16	Banten	-	10	-	10
17	Bali	-	51	-	51
18	NTB	-	31	2	33
19	NTT	-	94	3	97
20	Kalbar	4	67	4	75

21	Kalteng	6	97	-	106
22	Kalsel	6	50	4	60
23	Kaltim	-	30	1	31
24	Kaltara	-	28	-	28
25	Sulut	-	11	3	14
26	Sulteng	-	78	2	80
27	Sulsel	2	104	1	107
28	Sultra	-	50	2	52
29	Gorontalo	-	38	2	40
30	Sulbar	-	27	-	27
31	Maluku	2	60	2	64
32	Maluku Utara	-	29	-	29
33	Papua Barat	2	16	-	18
34	Papua	1	16	3	20
Jumlah		26	1621	81	1728

(BPS, Inventarisasi Kawasan Hutan, 2020)

Perhutanan Sosial yang berada di 33 provinsi tersebut, memberikan peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan, melalui pemanfaatan kawasan hutan dalam beberapa komoditas usaha hasil hutan.

Komoditas hasil hutan yang berpotensi usaha meliputi: Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Jasa Lingkungan (ekowisata, *carbon trade*, pemanfaatan energi surya, energi air, dan sebagainya). Komoditas HHBK antara lain: tanaman *Multipurpose Trees Species (MPTS)* yaitu; tanaman kayu yang memiliki beragam fungsi seperti menghasilkan buah - buahan/biji - bijian, dedaunan untuk pakan ternak, ranting dan dahannya untuk kayu bakar, serta fungsi – fungsi lainnya yang cocok dikembangkan di daerah tersebut.

Secara spesifik komoditas petani hutan yang mempunyai nilai jual cukup tinggi tetapi belum mampu menjadi faktor pengungkit dalam peningkatan kesejahteraan mereka adalah komoditas kopi *agroforestry*. Kopi *agroforestry* merupakan kopi yang berasal dari kawasan hutan, dimana tanaman kopi tumbuh disela – sela tegakkan pohon lainnya. Keunggulan kopi *agroforestry* juga

merupakan penyangga bagi kawasan hutan, sehingga dapat mempertahankan fungsi hutan secara berkelanjutan.

Permasalahan petani kopi *agroforestry* diatas cukup menarik untuk diteliti mengingat Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar keempat dunia setelah Negara: Brazil, Kolombia, dan Vietnam (*Kementerian Pertanian*, 2020). Ini menunjukkan bahwa komoditas kopi di Indonesia memiliki daya saing dalam perdagangan internasional. Saat ini total produksi kopi di Indonesia, ±30% nya diperuntukkan bagi konsumsi domestik, sedangkan sisanya sebesar ±70% merupakan komoditas ekspor ke berbagai Negara di dunia (*Asosiasi Ekportir dan Industri Kopi Indonesia*, 2020).

Berbagai diversifikasi produk kopi saat ini dihasilkan oleh industri pengolahan kopi, yang antara lain didapat dari petani kopi *agroforestry*. Disisi lain industri kopi di Indonesia akhir - akhir ini terus meningkat, hal tersebut dapat dicermati dengan tingginya angka produksi kopi pertahunnya. Berikut tabel produksi kopi dari tanaman rakyat mulai tahun 2017 – 2021 yang terus meningkat.

TABEL 1.2
Produksi Kopi Tanaman Rakyat Tahun 2017 – 2021

No	Provinsi	Ribu ton/tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Aceh	68.493	70.774	72.652	73.411	73.674
2	Sumut	67.544	71.023	74.922	74.997	74.512
3	Sumbar	17.553	18.452	15.316	12.264	16.337
4	Riau	2.857	3.029	2.588	2.410	2.500
5	Kepri	0	0	0	0	0
6	Jambi	14.395	15.461	16.393	18.713	19.718
7	Sumsel	184.166	193.507	191.081	191.081	188.760
8	Kep. Babel	4	9	11	17	17
9	Bengkulu	58.971	60.346	62.567	62.704	69.861

10	Lampung	107.219	110.597	117.111	118.149	115.689
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	16.904	21.119	21.014	22.372	22.814
13	Banten	2.609	2.564	2.558	2.183	2.156
14	Jawa Tengah	11.196	20.686	21.732	20.922	15.136
15	D.I.Y	417	483	513	534	550
16	Jawa Timur	14.711	14.529	19.157	18.498	18.675
17	Bali	13.570	15.243	15.255	15.300	15.759
18	NTB	4.865	5.058	5.369	5.855	5.822
19	NTT	21.468	23.737	24.088	24.238	24.921
20	Kalbar	3.688	3.617	3.802	3.729	3.630
21	Kalteng	410	397	405	394	372
22	Kalsel	1.569	1.517	1.349	1.291	1.360
23	Kaltim	325	297	224	225	198
24	Kaltara	213	173	174	179	177
25	Sulut	3.478	3.892	3.730	3.705	3.697
26	Gorontalo	200	165	139	139	160
27	Sulteng	2.688	2.817	2.588	2.594	2.622
28	Sulsel	33.486	34.716	34.665	33.728	36.014
29	Sulbar	3.308	3.198	4.132	4.300	4.331
30	Sultra	2.668	2.492	2.765	2.798	2.762
31	Maluku	397	400	411	394	401
32	Maluku Utara	88	10	14	15	8
33	Papua	2.503	2.742	2.789	2.792	2.777
34	Papua Barat	1	1	1	2	2
Rata – rata		717.962	756.051	752.511	753.941	765.415

(Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2021)

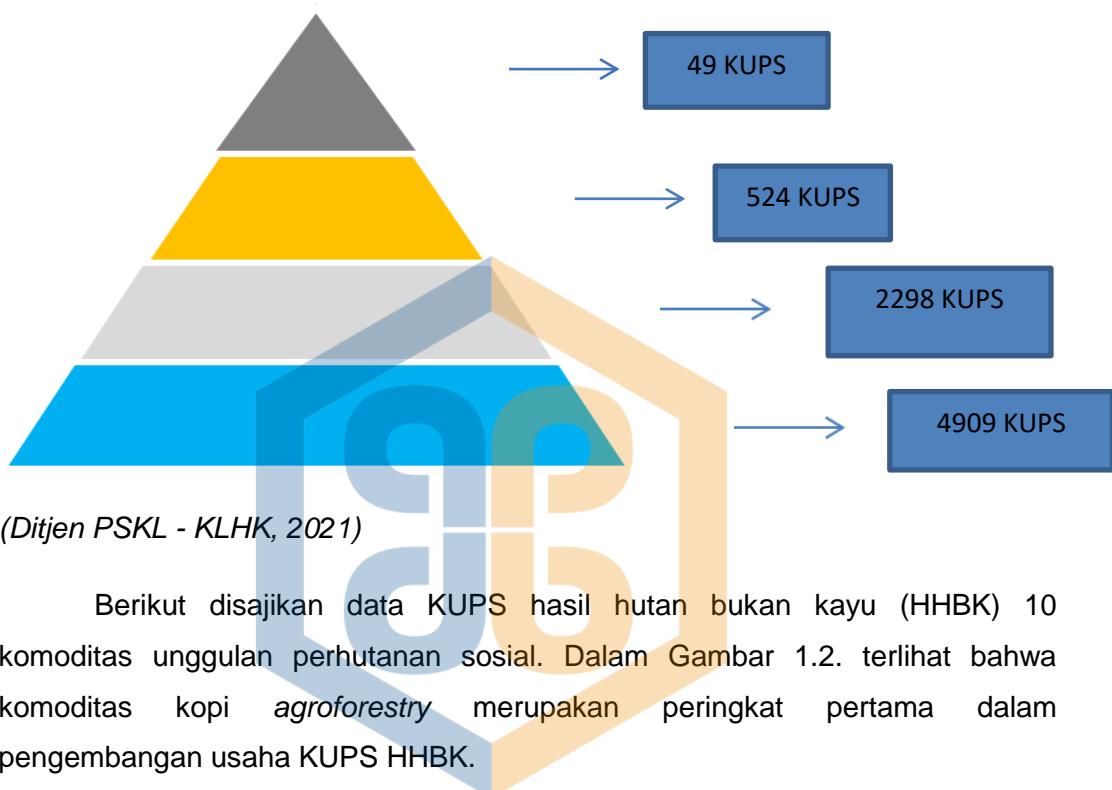
Pengembangan usaha perhutanan sosial selama ini difasilitasi oleh KLHK melalui Ditjen PSKL dalam pembentukan unit usaha berbasis komoditas hasil hutan. Unit usaha tersebut merupakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Klasifikasi KUPS dibagi dalam empat kategori yaitu: biru, perak, emas dan platinum. Kategori KUPS tersebut menggambarkan kemampuan dan status unit usahanya. **KUPS Biru** adalah yang belum memiliki potensi bisnis komoditas produknya, tetapi sudah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial. **KUPS Perak** telah memiliki potensi bisnis komoditas produknya dan telah melakukan aktivitas usaha dalam skala kecil/lokal. **KUPS Emas** telah mengembangkan potensi bisnisnya dan telah melakukan aktivitas usaha skala regional/daerah. Sedangkan **KUPS Platinum** yang telah mengembangkan bisnisnya baik skala nasional maupun internasional.

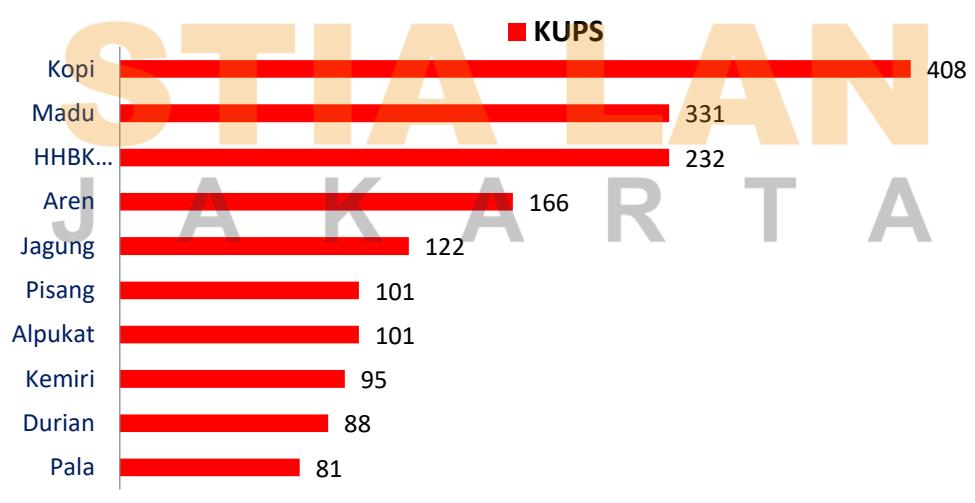
Berikut disajikan Gambar 1.1 yang menunjukkan realisasi dan klasifikasi KUPS dalam kelola usahanya. Angka KUPS Biru dan Perak yang masing sangat besar, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat penerima persetujuan pengelolaan perhutanan sosial masih belum dapat mencapai kemandiriannya khususnya kemandirian ekonomi dan usahanya. Kemandirian KUPS diukur salah satunya melalui klasifikasi emas dan platinum, dimana telah mampu menembus pasar nasional bahkan internasional untuk perniagaan komoditasnya.

KUPS dengan klasifikasi mandiri tersebut cenderung tidak membutuhkan pendampingan dalam penguatan kelembagaan, pemanfaatan kawasan hutan dan pengembangan usahanya. Sedangkan klasifikasi biru dan perak masih membutuhkan pendampingan dalam pengembangan usaha. mengingat KUPS biru dan perak baru dalam tahap mengidentifikasi potensi dan memulai usahanya sehingga belum dapat mengembangkan usahanya terutama dalam akses pasarnya.

GAMBAR 1.1
Realisasi dan Kualifikasi KUPS (HHK, HHBK, Jasa Lingkungan)



GAMBAR 1.2
Data KUPS Sepuluh Komoditas HHBK
10 Komoditas HHBK Produk Perhutanan Sosial



(Ditjen PSKL – KLHK, 2020)

Beberapa KUPS Kopi *Agroforestry*, saat ini memiliki kendala dalam pengelolaan usahanya, antara lain:

1. Belum adanya penambahan nilai produk pada komoditas kopi *agroforestry*. Rata – rata KUPS masing menjual komoditasnya dalam bentuk bahan mentah, belum diolah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi.
2. Belum adanya inovasi dalam pengembangan usaha kopi *agroforestry*, model bisnis masih sederhana dan bersifat jual beli komoditas saja.
3. Kedua hal tersebut diatas terkait dengan minimnya kualitas SDM dalam pengembangan usaha kopi *agroforestry*.
4. Ketidakmampuan dalam persaingan pasar, hal tersebut disebabkan pengembangan pasar yang belum optimal.
5. Permasalahan krusial lainnya, petani kopi *agroforestry* dianggap tidak "bankable" dalam mengakses permodalan. Hal ini pula yang menyebabkan petani kopi *agroforestry* terjebak dalam pola tata niaga yang dikuasai oleh "pedagang perantara" tersebut.

Ketergantungan petani kopi *agroforestry* terhadap modal usaha dari para tengkulak tidak hanya pada sistem perdagangan komoditas kopi saja, tetapi mulai dari pengadaan; bibit tanaman, budidaya dan sarana produksi (saprodi). Jerat tersebut telah mengakar dan cenderung bersifat permanen, sehingga menyebabkan semakin terpuruknya petani kopi *agroforestry*. (hasil wawancara informal dengan petani hutan di beberapa lokasi perhutanan sosial ditingkat tapak, 2018 - 2021).

KLHK menyadari beratnya mewujudkan petani hutan yang mandiri secara ekonomi dan usaha melalui Program Perhutanan Sosial. Mengingat mandat tersebut melampaui fungsi, tugas dan kewenangan KLHK. Sehingga Program Perhutanan Sosial tidak dapat optimal apabila menjadi tanggung jawab KLHK saja. Maka dibutuhkan suatu kebijakan yang bersifat kolaboratif antar pemangku kepentingan/stakeholder terkait dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan usaha tersebut.

Kebijakan dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* dianggap menjadi alternatif solusi dalam memproteksi petani kopi

agroforestry dari praktik perdagangan bebas yang sampai saat ini masih berlangsung. Bagaimana pemerintah dan *stakeholder* terkait berkolaborasi dalam mendorong terwujudnya kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*, sehingga praktik perdagangan bebas (*free trade*) menjadi perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) dapat terwujud.

Penentuan lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Jawa Barat melalui SK. Gubernur Jawa Barat Nomor. 522/Kep-410-Rek/2020, sehingga telah ada komitmen yang kuat oleh Pemda Provinsi dalam mendorong kolaborasi antar *stakeholder* terkait dalam mendukung tata kelola usaha perhutanan sosial, khususnya kopi *agroforestry*.
2. Komoditas kopi *agroforestry* di beberapa lokasi di Provinsi Jawa Barat secara kualitas masuk dalam skala menengah sampai tinggi/premium.
3. Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil kopi tanaman rakyat tertinggi di pulau Jawa (Tabel 1.2) dan kopi *agroforestry* merupakan komoditas KUPS tertinggi dalam Program Perhutanan Sosial (Gambar 1.1)
4. Petani hutan di Pulau Jawa (termasuk di Provinsi Jawa Barat) rata – rata hanya mengelola lahan berkisar ± 0.5 Ha per kepala keluarga. Penggunaan/pemanfaatan lahan yang sempit dianggap menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap angka rentan kemiskinan. Diperkirakan hutan di Pulau Jawa dikelilingi oleh ± 6.807 desa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 13.410.384 KK ($\pm 30\%$ penduduk Pulau Jawa) (BPS, 2015).

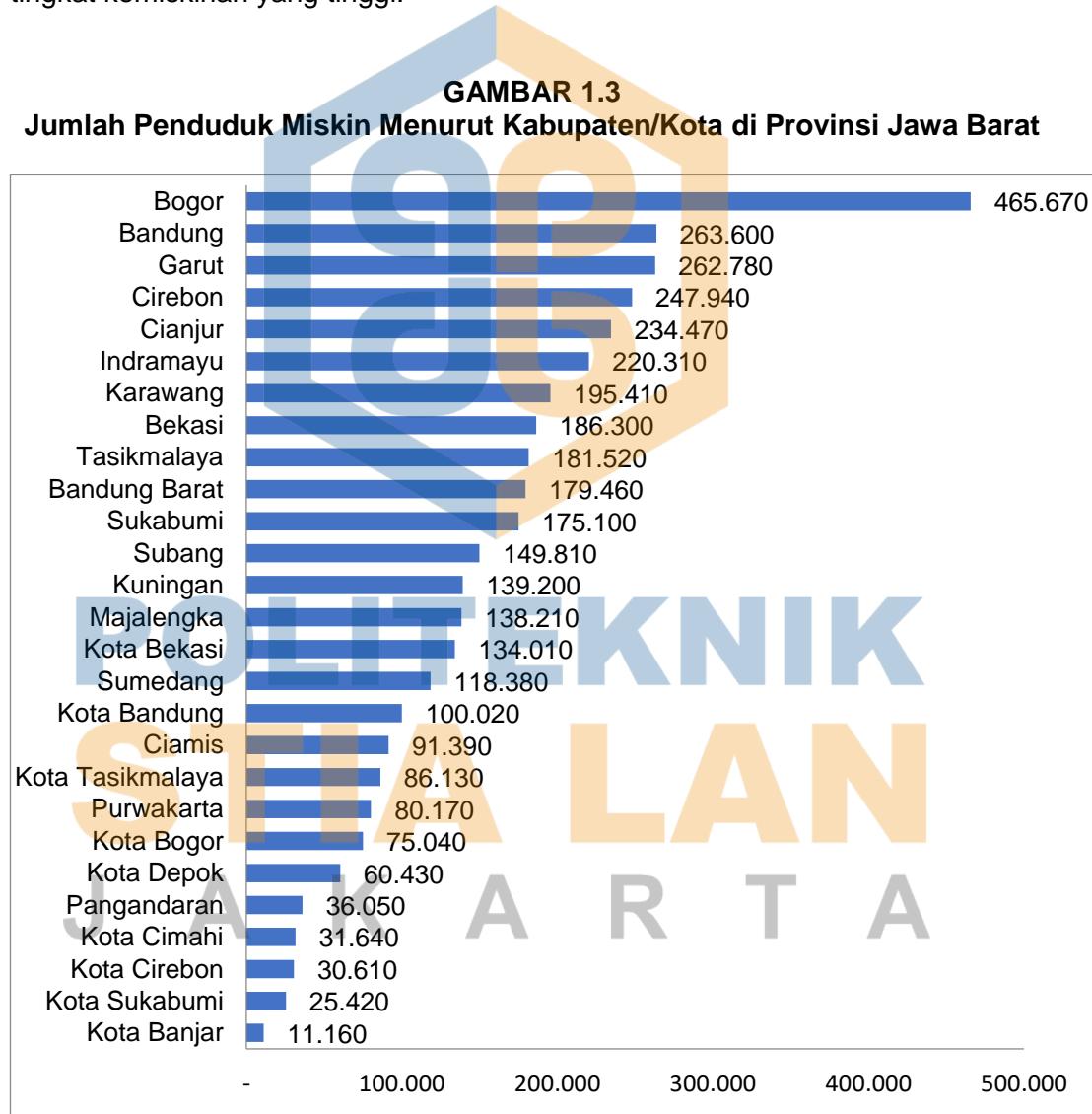
Berikut tabel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan kopi tanaman rakyat, kopi dari perkebunan swasta maupun perkebunan negara. Data menunjukkan $\pm 95\%$ produksi kopi di Provinsi Jawa Barat berasal dari kopi tanaman rakyat dan $\pm 5\%$ merupakan kopi yang diproduksi dari perkebunan swasta dan perkebunan negara.

TABEL 1.3
Produksi Tanaman Kopi Provinsi Jawa Barat

Kabupaten /Kota	Produksi Tanaman Kopi (Ton/Tahun)								
	Perkebunan			Perkebunan			Perkebunan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bogor	2962.00	3854.37	3854.00	0.00	2.16	2.00	-	0.00	-
Sukabumi	117.00	166.64	182.00	178	46.30	4.00	-	0.00	-
Cianjur	773.00	2384.20	384.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Bandung	5401.00	6798.21	298.00	0.00	0.00	0.00	-	27.29	-
Garut	2464.00	2949.00	249.00	0.00	0.00	0.00	-	1.61	-
Tasikmalaya	2740.00	149.91	149.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Ciamis	167.00	163.95	964.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kuningan	780.00	1286.31	852.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Cirebon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Majalengka	202.00	230.33	230.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Sumedang	624.00	955.58	899.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Indramayu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Subang	491.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Purwakarta	174.00	189.22	189.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Karawang	207.00	207.20	218.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Bekasi	1.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Bandung	459.00	990.10	990.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Pangandaran	267.00	268.60	269.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota Bogor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota Cirebon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota Bekasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota Depok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota Cimahi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota	4.00	4.55	5.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Kota Banjar	5.00	6.15	6.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Provinsi	17939.00	21298.37	2083.00	184.00	48.47	6.00	-	28.90	-

(BPS Provinsi Jawa Barat, 2020)

Data Tabel 1.3, cukup bertolak belakang dengan data terkait jumlah angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat yang tersaji dalam Gambar 1.3. Data tersebut memberikan informasi angka kemiskinan tertinggi merupakan Kabupaten yang menghasilkan kopi tanaman rakyat dengan produktivitas tertinggi se- Provinsi Jawa Barat. Kedua data tersebut menjadi informasi yang cukup menarik untuk dicari penyebabnya, mengapa dari beberapa Kabupaten yang memiliki produktivitas kopi tanaman rakyat yang tinggi tetapi justru memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.



(BPS Provinsi Jawa Barat, 2020)

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, Provinsi Jawa Barat dianggap layak dijadikan sebagai obyek penelitian dalam memperbaiki tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* yang selama ini belum berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petaninya.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang tertuang dalam Latar Belakang, memberikan pemahaman akan pentingnya peran para pihak dalam mendorong tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* sehingga lebih optimal, dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petaninya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Belum adanya tata kelola perniagaan kopi yang terlembaga, interaksi perniagaan sampai saat ini hanya melalui "pasar bebas", sehingga petani menjadi pihak yang termarginalkan karena tidak memiliki nilai tawar dalam perniagaan komoditasnya.
2. Belum terbangunnya integrasi kegiatan *on farm* (pengolahan kawasan hutan) dan kegiatan *off farm* (diluar kegiatan budidaya dan produksi di kawasan hutan), yang terkait langsung dengan pengelolaan paska panen, (misal: *packaging product*, *rebranding product*, pemasaran produk berbasis IT yaitu *digital marketing*, pengangkutan/ekspedisi, dan lain sebagainya). Hal tersebut menuntut adanya pembangunan dan pengembangan industri berbasis komoditas hasil hutan, berupa sentra - sentra produk unggulan yang berskala regional, nasional, maupun internasional, salah satunya komoditas unggulan perhutanan sosial yaitu kopi *agroforestry*.
3. Sulitnya petani kopi *agroforestry* memperoleh akses permodalan, karena dianggap tidak *bankable*. Maka praktek pengijon/tengkulak tumbuh subur. Terbukti dibeberapa KTH masih ditemukan praktek tersebut menguasai hampir sebagian besar rantai perdagangan kopi *agroforestry*.
4. Rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan petani kopi *agroforestry* dalam pengelolaan komoditasnya, mulai budidaya tanaman, sampai pengelolaan paska panen. Sehingga peningkatan nilai tambah produk komoditas kopi *agroforestry* belum optimal.

C. Rumusan Permasalahan

Hambatan yang tertuang dalam Identifikasi Permasalahan tersebut, bermuara pada rumusan permasalahan yaitu:

Beberapa identifikasi permasalahan tersebut, bermuara pada rumusan permasalahan yaitu:

1. Permasalahan apa sajakah yang menyebabkan tata niaga kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan efektif, sehingga belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani?
2. Faktor - faktor penghambat apa sajakah yang menyebabkan peran pemerintah dan *stakeholder* terkait selama ini belum efektif, dan faktor – faktor pendukung apa sajakah yang dapat dioptimalkan sehingga peran pemerintah dan *stakeholder* terkait dapat lebih efektif dalam perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana model *collaborative governance* yang efektif dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan tata niaga kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat, yang belum berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam upaya perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Jawa Barat
3. Menyusun model *collaborative governance* yang efektif dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat

Guna mencapai tujuan penelitian maka penting pelibatan unsur – unsur pemerintah (kementerian, lembaga, pemerintah daerah) maupun non pemerintah (sektor swasta/pelaku usaha kopi *agroforestry*, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kelompok tani hutan, perguruan tinggi maupun

media massa), yang dapat memberikan data dan informasi, pengetahuan dan wawasan terkait realita dalam perniagaan kopi *agroforestry*, sehingga dapat dijadikan bahan analisis dalam rekomendasi kebijakan terkait perbaikan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry* di Provinsi Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain;

1. Manfaat Akademis:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik dalam fungsi manajemen pelayanan publik. Dimana *collaborative governance* merupakan salah satu inovasi menuju *good governance*.
- b. Manfaat lainnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lainnya guna pengembangan metode baru dalam tata kelola pemerintahan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Rekomendasi kebijakan dalam membangun kelembagaan tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*, sebagai upaya nyata pemerintah dalam perbaikan tata niaga kopi *agroforestry*.
- b. *Collaborative governance* pada dasarnya merupakan salah satu instrumen dalam menyatukan peran para *stakeholder* dalam implementasi kebijakan publik, khususnya dalam penelitian ini terkait tata kelola perniagaan kopi *agroforestry*.
- c. Sebagai salah satu upaya dalam perbaikan administrasi pembangunan negara di sektor kehutanan.